

<b>Jenis Penelitian</b>	Kajian Aktual Strategis : Kluster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
<b>Tema</b>	Pengembangan Pendidikan
<b>Ketua Tim</b>	<b>Dr. Khalilah, M.Pd</b>

**1. Judul Proposal Penelitian: Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Yang Dihadapi oleh Kalangan Mahasiswa di Lingkungan PTKIN dan PTKIS**

**2. Abstrak**

Merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak tahun 2020. Meski demikian, riset yang secara khusus memetakan kendala dan tantangan pelaksanaan kebijakan tersebut di kalangan mahasiswa, khususnya yang belajar di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan/atau Ilmu Keguruan yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia belum banyak dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memetakan apa saja tantangan dan kendala pelaksanaan kebijakan tersebut yang dialami oleh para mahasiswa tersebut dan upaya apa saja yang mereka lakukan untuk mengatasi tantangan dan kendala yang mereka hadapi ketika mengikuti program MBKM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran. Pertama, metode penelitian studi kasus akan dilakukan dengan memilih mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan yang kuliah di IIQ Jakarta dan berbasis data-data wawancara mendalam dari kalangan mahasiswa di kampus tersebut yang mengikuti program MBKM. Kedua, metode penelitian survei dilakukan untuk memetakan tantangan dan kendala yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia. Kajian pustaka juga akan dilakukan pada dokumen-dokumen dan artikel-artikel yang dipublikasikan oleh jurnal dan media massa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Data-data kualitatif nantinya akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi tematik, sedangkan data-data kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga jenis kontribusi berikut. Pertama, memberikan peta yang lebih komprehensif terkait dengan tantangan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan MBKM yang dihadapi oleh para mahasiswa, khususnya yang belajar di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan/atau Ilmu Keguruan yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia. Kedua, mengembangkan model manajemen pendidikan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan MBKM, dengan mengambil pelajaran dari ragam tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa tersebut. Ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan MBKM khususnya di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia.

**Kata-kata kunci:** *kebijakan pendidikan; manajemen pendidikan; MBKM; mahasiswa; PTKIN; PTKIS*

### 3. Latar Belakang

Sudah cukup sering Presiden Jokowi menyampaikan himabuan kepada para penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi di Indonesia agar perguruan tinggi yang mereka pimpin lebih mampu beradaptasi di tengah disrupsi digital. Salah satu diantaranya dia sampaikan ketika memberikan pidato pada peluncuran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada hari Selasa, 3 November 2020. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa perguruan tinggi harus mampu bertransformasi untuk merespons ragam perubahan kehidupan publik yang diakibatkan oleh disrupsi digital. Karena itu menurutnya, perubahan kurikulum perlu terus dilakukan, paradigma baru dalam merespon disrupsi digital perlu dijalankan dan beragam jenis kolaborasi juga harus terus dikembangkan. Ia memberikan arahan agar program-program studi yang ada di setiap perguruan tinggi lebih berinovasi (Prasetyo, 2021) dan dikembangkan ke arah multi, inter dan transdisipliner dengan berorientasi tidak semata-mata pada *theory building*, namun lebih mampu sebagai *problem solving* dan *impact making* (Laksana AS, 2020).

Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, sebagaimana yang disebutkan di atas, menyiratkan harapannya yang sangat besar pada keberhasilan program MBKM. Kebijakan MBKM ini merupakan salah satu jenis kebijakan pendidikan yang diluncurkan oleh Pemerintah berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat 2 Permendikbud tersebut, program MBKM merupakan bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan di luar program studi yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Program pembelajaran melalui MBKM ini dapat dilakukan melalui empat jenis kegiatan pembelajaran berikut. *Pertama*, pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama. *Kedua*, pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda. *Ketiga*, pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda. *Keempat*, pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi. Berdasarkan keempat ketentuan tersebut, program MBKM dapat dijalankan dengan mencakup sejumlah kegiatan seperti magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, kegiatan pengembangan kewirausahaan, riset/penelitian, pertukaran pelajar, program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan studi proyek independen. Dalam pasal 18 ayat 3 Permendikbud tersebut disebutkan bahwa Perguruan tinggi (PT) yang menjalankan program MBKM ini wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk menentukan dan mengambil ataupun tidak mengambil SKS (satuan kredit semester) di luar kampusnya

sebanyak dua semester atau setara 40 SKS. Selain itu, mahasiswa juga memiliki kebebasan untuk mengambil SKS di prodi lain di kampusnya sebanyak satu semester dari keseluruhan total semester yang ditempuhnya.

Kebijakan MBKM ini diluncurkan secara resmi oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada Jumat 24 Januari 2020. Sejak saat itu, sejumlah upaya tampak terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong pencapaian pelaksanaan arena-arena yang menjadi bagian dari program MBKM tersebut. Sebagai contoh misalnya, terkait dengan program pertukaran mahasiswa merdeka, Pemerintah menargetkan agar program ini dapat diikuti oleh 20.000 mahasiswa pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 (Mediana, 2021). Selain itu, serangkaian kegiatan sosialisasi juga terus dilakukan oleh Pemerintah, khususnya melalui Kemendikbud, kepada para penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi, pengajar dan juga mahasiswa. Tidak hanya itu, sejumlah kerjasama dengan kalangan industri, pelaku usaha dan kalangan praktisi/professional juga terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program MKBM ini.

Meski memiliki tujuan ideal, kebijakan MBKM sempat menuai kontroversi dari berbagai pihak. Sebagian menilai bahwa kebijakan MBKM ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi mahasiswa namun juga kalangan pelaku usaha, industri dan masyarakat. Meski demikian, kebijakan ini dipandang masih menyimpan sejumlah masalah. Kebijakan MBKM pada esensinya dapat memberikan beragam jenis manfaat, khususnya bagi para mahasiswa. Mereka yang mengikuti salah satu atau beberapa jenis arena MBKM dapat memperoleh pengalaman lapangan dan memperluas wawasan mereka serta memperkuat keterampilan yang mereka perlukan dalam mengembangkan karirnya di masa depan. Mereka juga dapat memperoleh pengalaman magang di lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan di luar kampus. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan pengalaman sebagai pengajar di satuan-satuan pendidikan, mengembangkan proyek kewirausahaan dan kemanusiaan serta berbagai program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, kebijakan ini juga dapat memunculkan sejumlah masalah karena wataknya, yang oleh beberapa praktisi, dipandang cenderung ekspansif, menimbulkan beban administrative baru bagi dosen dan pengelola perguruan tinggi (Triwiyanto, 2021) dan kurang menekankan model pembelajaran yang bersifat reflektif (Wisetroto, 2021). Disamping itu, kebijakan ini juga dinilai dapat menimbulkan adanya kasta baru dalam dunia pendidikan. Hal ini disebabkan ketika ketidaksetaraan kondisi dan kapasitas mahasiswa dan dosen di masing-masing kampus menjadikan tingkat adaptasi dosen dan mahasiswa untuk mencapai target merdeka belajar

menjadi tidak sama. Kemampuan masing-masing kampus dalam berkolaborasi dengan institusi-institusi di luar kampus juga dan tingkat dukungan pendanaan dari masing-masing kampus dan yang menjadi mitra mereka juga bisa menyebabkan kesenjangan tingkat capaian MBKM di masing-masing perguruan tinggi (Zaluchu, 2022).

Di tengah kontroversi tersebut, keberadaan mahasiswa sebagai subyek utama dalam implementasi kebijakan MBKM adalah sangat penting. Kebijakan MBKM yang dirumuskan oleh Pemerintah ataupun yang di-desain oleh Universitas, Fakultas dan Program Studi, tentu tidak sepenuhnya sama dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Beragam tantangan dan kendala dapat saja muncul dan dihadapi oleh berbagai pihak pemangku kepentingan yang menjalankan kebijakan ini dan juga mahasiswa sebagai pelaku utama yang menjalankan kebijakan ini. Penelitian ini berasumsi bahwa tidak hanya pimpinan/pengelola Universitas, Fakultas dan Program Studi saja yang menemui dan menghadapi tantangan dan kendala semacam itu. Beragam tantangan dan kendala juga dihadapi oleh para mahasiswa yang mengikuti program-program MBKM tersebut.

#### **4. Rumusan Masalah**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah berikut: apa saja tantangan dan kendala pelaksanaan kebijakan tersebut yang dialami oleh para mahasiswa tersebut dan upaya apa saja yang mereka lakukan untuk mengatasi tantangan dan kendala yang mereka hadapi ketika mengikuti program MBKM?

#### **5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tiga hal berikut.

- a. Memberikan peta yang lebih komprehensif terkait dengan tantangan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan MBKM yang dihadapi oleh para mahasiswa, khususnya yang belajar di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan/atau Ilmu Keguruan yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia.
- b. Mengembangkan model manajemen pendidikan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan MBKM, dengan mengambil pelajaran dari ragam tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa tersebut.
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh Pemerintah dan pimpinan/pengelola Universitas, Fakultas dan Program Studi untuk meningkatkan

kualitas pelaksanaan kebijakan MBKM khususnya di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia.

## **6. Kajian Pustaka/Tinjauan Literatur Terdahulu**

Sejak pertama kali diluncurkan awal tahun 2020 lalu, kebijakan MBKM mengundang kontroversi dari berbagai pihak. Sebagian kalangan menilai kebijakan MBKM ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi mahasiswa namun juga kalangan pelaku usaha, industri dan masyarakat (Mulyono, 2020; Rokhman, 2021). Sebagian kalangan lainnya menilai sebaliknya. Kebijakan MBKM ini justru dianggap dapat memunculkan sejumlah masalah karena wataknya, yang cenderung ekspansif yang akan menimbulkan beban administrative baru bagi dosen dan pengelola perguruan tinggi (Triwiyanto, 2021). Selain dianggap kurang menekankan model pembelajaran yang bersifat reflektif (Wisetroto, 2021), kebijakan MBKM ini juga dinilai dapat memicu munculnya kasta baru kasta baru dalam dunia pendidikan di tengah masih maraknya perbedaan kemampuan masing-masing kampus dalam berkolaborasi dengan institusi-institusi di luar kampus dan kemampuan pendanaan mereka untuk mendukung kebijakan MBKM ini dan juga ketidaksetaraan kondisi dan kapasitas mahasiswa dan dosen di masing-masing kampus yang menjadikan tingkat adaptasi dosen dan mahasiswa untuk mencapai target merdeka belajar menjadi tidak sama (Zaluchu, 2022).

Pelaksanaan kebijakan MBKM selama beberapa tahun terakhir terus mengundang perhatian dan kontroversi dari berbagai kalangan, termasuk kalangan akademisi dan peneliti di bidang pendidikan. Sejumlah penelitian terkait dengan kebijakan MBKM tersebut selama beberapa tahun terakhir terus dilakukan. Penelitian yang ada hingga saat ini pada umumnya fokus pada implementasi MBKM, baik di level program studi (Wardhani dkk, 2022) dan fakultas (Rodiyah, 2021; Puspitasari & Nugroho, 2021), maupun level universitas (Fuadi & Aswita). Sejumlah penelitian lainnya juga dilakukan untuk mengkaji tingkat kesiapan program studi dalam pelaksanaan kurikulum MBKM (Zakiyyah dkk., 2021) dan pencarian role model yang tepat dalam implementasi kurikulum MBKM (Aji & Putra, 2021). Meski demikian penelitian yang secara khusus memetakan tantangan dan kendala dan tantangan pelaksanaan kebijakan MBKM tersebut dari sudut pandang mahasiswa secara umum masih terbatas.

Penelitian alternative lainnya juga dilakukan untuk mengevaluasi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan kebijakan MBKM (Kamalia & Andriansyah, 2021; Astuti dkk., 2021). Sejumlah penelitian juga dilakukan untuk mengkaji implementasi program kegiatan yang

menjadi bagian dari arena-arena pelaksanaan MBKM, seperti bentuk-bentuk partisipasi mahasiswa dalam proyek pembangunan di desa (Mariyana dkk., 2022) dan mengajar di satuan-satuan pendidikan (Widiyono dkk., 2021). Dari sini tampak bahwa penelitian yang mengkaji kebijakan MBKM tersebut secara umum sudah mulai difokuskan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan MBKM dari sudut pandang mahasiswa. Meseki demikian, sebuah kajian yang secara khusus memetakan apa saja tantangan dan kendala pelaksanaan kebijakan tersebut yang dialami oleh para mahasiswa tersebut dan upaya apa saja yang mereka lakukan untuk mengatasi tantangan dan kendala yang mereka hadapi ketika mengikuti program MBKM belum banyak dilakukan.

## **7. Kerangka Konsep**

Program MBKM adalah model pembelajaran yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa di luar program studi yang ada di masing-masing perguruan tinggi tempatnya belajar (Pasal 15 Ayat 2 Permendikbud No. 3 tahun 2020). Mereka dapat menggunakan haknya untuk mengikut program MBKM melalui empat jenis kegiatan/model pembelajaran berikut. *Pertama*, kegiatan/model pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi lain pada Perguruan Tinggi tempat dia terdaftar sebagai mahasiswa. *Kedua*, kegiatan/model pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi yang sama, namun pada Perguruan Tinggi yang berbeda dengan tempatnya terdaftar sebagai mahasiswa. *Ketiga*, kegiatan/model pembelajaran yang diselenggarakan oleh program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dengan tempatnya terdaftar sebagai mahasiswa. *Keempat*, kegiatan/model pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga non Perguruan Tinggi. Keempat jenis kegiatan/model MBKM tersebut dapat dijalankan dengan mencakup sejumlah kegiatan berikut, yaitu magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, kegiatan pengembangan kewirausahaan, riset/penelitian, pertukaran pelajar, program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan studi proyek independen. Dalam skema kebijakan MBKM ini, Perguruan tinggi (PT) yang menjalankan kegiatan/model pembelajaran MBKM ini diwajibkan untuk memfasilitasi mahasiswa yang menggunakan haknya untuk mengambil SKS (satuan kredit semester) di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara 40 SKS dan mengambil SKS di prodi lain di kampusnya sebanyak satu semester dari keseluruhan total semester yang ditempuhnya (Pasal 18 ayat 3 Permendikbud No. 3 tahun 2020).

Kebijakan MBKM merupakan salah satu jenis produk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pendidikan sebagai salah satu bidang kehidupan publik. Menurut Fan (2020), kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang dapat dirumuskan dan dikembangkan dan diperlukan serta digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan. Kebijakan pendidikan pada esensinya dapat mencakup banyak hal, mulai dari seperangkat peraturan, rencana, panduan dan program-program yang secara khusus dimaksudkan untuk merespons isu-isu dalam dunia pendidikan, menyelesaikan beragam kontroversi dan konflik yang muncul dalam dunia pendidikan dan menciptakan model manajemen yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Fan (2020) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak bersifat statis. Sebaliknya, kebijakan pendidikan cenderung bersifat dinamis. Karena sifatnya yang dinamis inilah menjadikan kebijakan pendidikan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengelola beragam tantangan maupun permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Dengan sifatnya yang dinamis ini pula kebijakan pendidikan perlu terus dikembangkan agar mampu merespons perkembangan yang ada di luar institusi pendidikan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam dunia pendidikan, merespons beragam jenis perubahan yang ada di masyarakat dan memenuhi harapan dari sejumlah pihak yang menjadi mitra institusi pendidikan dalam kurun waktu tertentu (Fan, 2020: xi-xii).

Ada beragam elemen dan faktor yang dapat menentukan kebijakan pendidikan. Watak dan orientasi kebijakan pendidikan pada umumnya tidak lepas dari prinsip-prinsip ideologi tertentu yang menjadi arus utama pada periode tertentu. Prinsip-prinsip tersebut seringkali menentukan seperti apa bentuk dan arah kebijakan pendidikan yang berkembang di sebuah Negara. Selama beberapa dasawarsa terakhir, prinsip-prinsip liberalisasi dan neoliberalisme tampak terus mempengaruhi dunia pendidikan tinggi di berbagai belahan dunia. Perguruan tinggi kian dituntut lebih mampu memenuhi kebutuhan pasar, memberikan berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar dan juga memberikan manfaat nyata bagi para lulusannya (Saunders, 2010). Seiring dengan perkembangan tersebut, tiga model pendidikan juga terus mewarnai dunia pendidikan tinggi di berbagai belahan dunia. *Pertama*, model pendidikan yang menekankan pada proses pendidikan sebagai instrument untuk mendapatkan kemanfaatan ekonomi. *Kedua*, model pendidikan yang menekankan keberadaan pendidikan sebagai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukannya dalam kehidupan bersama. *Ketiga*, model pendidikan yang berbasis pengembangan kapabilitas dimana pendidikan dipandang tidak hanya sebagai

instrument untuk mendapatkan kemanfaatan ekonomi saja, namun juga sekaligus sebagai sarana untuk mengakuisi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik di masa depan (Robeyns, 2006).

Ada beragam jenis model kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang selama didefinisikan oleh para ahli. Sebagai contoh, Van Vught (1995) mengategorikan kebijakan pendidikan tinggi dalam dua jenis. *Pertama*, model kebijakan pendidikan tinggi yang sepenuhnya dikontrol oleh Negara atau yang disebut sebagai *the State control model*. *Kedua*, model kebijakan pendidikan tinggi yang disupervisi oleh Negara atau disebut sebagai *the State supervising model*. Model pertama ditandai dengan adanya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sepenuhnya dikembangkan dan didanai oleh Negara/Pemerintah. Berbeda dengan model yang pertama, model yang kedua tidak menempatkan Negara/Pemerintah sebagai aktor sentral yang sepenuhnya menentukan model kebijakan dan implementasi kebijakan pendidikan tinggi yang ada di sebuah Negara. Sebaliknya, Negara/Pemerintah memiliki posisi yang tidak sepenuhnya sebagai aktor sentral. Negara/Pemerintah hanya berfungsi untuk memberikan supervisi yang ditujukan untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi dengan berbasis pada otonomi penyelenggaraan pendidikan di masing-masing perguruan tinggi yang ada di Negara tersebut. Pada model yang kedua ini, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak hanya sepenuhnya dijalankan oleh Negara/Pemerintah saja, namun juga dijalankan oleh lembaga-lembaga Non-Negara/Non-Pemerintah (Van Vught, 1995).

Sejumlah kalangan berpendapat bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung berubah ke arah model kebijakan pendidikan yang digerakkan oleh pasar (*market-driven*) (Gaus dkk., 2019). Di tengah perubahan kebijakan pendidikan yang semacam ini, implementasi kebijakan dalam dunia pendidikan juga umumnya dilaksanakan dengan tiga model. *Pertama*, model yang berbasis pendekatan dari atas (*top-down approach*). *Kedua*, model yang berbasis pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*). *Ketiga*, model yang bersifat dealektis, yang mengkombinasikan kedua jenis pendekatan di atas (Gaus dkk., 2019).

Sejak Indonesia merdeka, kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung diwarnai dengan adanya peran pentingnya kehadiran negara/Pemerintah sebagai aktor utama yang merumuskan model dan implementasi kebijakan pendidikan. Pemerintah juga cenderung menempatkan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai komponen penting dalam strategi peningkatan investasi ekonomi untuk meningkatkan level daya saing Indonesia di kancah internasional (Gaus dkk., 2019: 97). Maka tidak heran jika, model kebijakan pendidikan

yang dianut dan diimplementasikan lebih berorientasi pada pasar (*market-oriented*) (Gaus dkk., 2019: 98), termasuk orientasi kurikulum MBKM (Media Indonesia, 1 Oktober 2021).

Dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa kebijakan MBKM merupakan kebijakan pendidikan yang tidak hanya sekedar berbasis pendekatan dari atas (*top-down approach*) yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh Negara (*the State control model*). Sebaliknya, kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan pendidikan yang disupervisi oleh Negara/Pemerintah (*the State supervising model*). Dalam kebijakan MBKM ini, Negara/Pemerintah memiliki posisi yang tidak sepenuhnya sebagai aktor sentral, sebaliknya hanya berfungsi untuk memberikan supervisi dengan tetap mengedepankan otonomi penyelenggaraan pendidikan di masing-masing perguruan tinggi dan membuka peran bagi Lembaga-lembaga Non-Negara/Non-Pemerintah (Van Vught, 1995). Terkait dengan yang terakhir, kebijakan MBKM merupakan jenis kebijakan pendidikan yang cenderung berorientasi pada pasar (*market-oriented*). Karena pasar bersifat sangat dinamis, tentu ada beragam tantangan dan kendala yang potensial dihadapi oleh sejumlah pihak yang mengimplementasikan kebijakan MBKM ini dan juga mahasiswa yang menjadi subyek utama yang menjalankan program-program MBKM tersebut.

## **8. Metode Penelitian**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini ditujukan untuk memetakan apa saja tantangan dan kendala pelaksanaan kebijakan tersebut yang dialami oleh para mahasiswa tersebut dan upaya apa saja yang mereka lakukan untuk mengatasi tantangan dan kendala yang mereka hadapi ketika mengikuti program MBKM. Untuk mengkaji kedua hal tersebut, penelitian ini akan dijalankan dengan metode penelitian campuran berbasis metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.

Metode studi penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian dengan karakteristik antara lain sebagai berikut. *Pertama*, penelitian dilakukan dengan setting yang bersifat alamiah. *Kedua*, keberadaan peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian. *Ketiga*, penelitian dapat menggunakan beragam jenis data untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian. Data tersebut bisa bersumber dari sumber-sumber data seperti data-data wawancara, observasi dan juga data-data dokumen (Creswell, 2014: 185). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang ditandai antara lain dengan karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, adanya setting penelitian yang bersifat alamiah. *Kedua*, keberadaan peneliti sebagai

instrument kunci dalam penelitian. Ketiga, menggunakan beragam jenis data untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian. Data tersebut bisa berasal dari sumber data yang beragam, mencakup data- wawancara, data observasi dan juga data-data dari dokumen atau pustaka (Creswell, 2014: 185).

Adapun metode penelitian kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan sebuah penelitian empiric yang meneliti phenomena kontemporer secara mendalam dengan konteks penelitian yang nyata (Yin, 2014: 3). Metode studi kasus digunakan karena metode ini memungkinkan untuk mengumpulkan beragam jenis data yang relevan dari berbagai sumber dan mengolah data-data tersebut untuk menghasilkan temuan-temuan konseptual (Yin, 2014: 27). Ada beragam jenis metode studi kasus. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode studi kasus deskriptif dengan kasus tunggal. Metode ini dipandang cocok untuk meneliti pertanyaan penelitian yang berbasis pertanyaan (seperti apa) ‘apa’ (Yin, 2014: 5). Dalam penelitian ini, studi kasus akan difokuskan pada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan yang kuliah di IIQ Jakarta. Kedua kampus di atas dipilih sebagai representasi kampus PTKIN dan PTKIS.

Data-data yang dikumpulkan kemudian diseleksi untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan apa yang menjadi fokus penelitian dalam artikel ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data-data wawancara mendalam dari kalangan mahasiswa di kampus tersebut yang mengikuti program MBKM. Data-data ini akan diperkaya dengan data-data sekunder yang berasal dokumen-dokumen dan artikel-artikel yang dipublikasikan oleh jurnal dan media massa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Mengacu pada pemikiran Sugiyono (2005), data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga tahapan sebagai berikut. Pertama, reduksi data. Kedua, verifikasi dan penyajian data. Ketiga, pembuatan simpulan analisis data (Sugiyono, 2005). Dalam konteks ini, reduksi data penulis lakukan dengan memilih data-data yang penting dan relevan dengan topik yang menjadi fokus penelitian penulis. Selanjutnya, verifikasi data penulis lakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah berikutnya, penyajian data penulis jalankan dengan melakukan pengelompokan dan analisis data-data secara tematik. Dalam konteks ini, penyajian hasil analisis data penulis lakukan dengan fokus pada dua hal yang menjadi fokus penelitian, sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas. Langkah terakhir, penarikan kesimpulan penulis lakukan berdasarkan hasil analisis atas data-data yang menjadi temuan utama dalam penelitian ini.

Selain dengan menggunakan metode penelitian studi kasus, penelitian ini juga akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan berbasis metode survei. Survei secara online akan dilakukan dengan menggunakan google forms. Pertanyaan atau kuesioner dalam survei tersebut disebarkan ke semua jaringan mahasiswa, khususnya yang mengambil program-program MBKM yang ada di Fakultas Taribyah dan/atau Ilmu Keguruan yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS melalui Whatsapps grup. Survei akan dilakukan dengan berbasis metode kuota sampling yang ditujukan kepada para mahasiswa Fakultas Taribyah dan/atau Ilmu Keguruan yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS di JABODETABEK yang mengambil program-program MBKM. Pada tahap berikutnya, survei akan dilakukan pada kepada para mahasiswa Fakultas Taribyah dan/atau Ilmu Keguruan yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS di luar wilayah JABODETABEK.

## **9. Rencana Pembahasan**

Penelitian ini direncanakan akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang mencakup tiga hal berikut. Pertama, peta yang berisi tantangan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan MBKM yang dihadapi oleh para mahasiswa, khususnya yang belajar di lingkungan Fakultas Taribyah dan/atau Ilmu Keguruan yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia—berdasarkan data-data survei dan juga studi kasus dari para mahasiswa yang belajar di Fakultas Taribyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Fakultas Taribyah IIQ Jakarta. Kedua, inovasi model manajemen pendidikan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan MBKM, dengan mengambil pelajaran dari ragam tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa baik yang bersumber dari data-data survei maupun studi kasus dari para mahasiswa yang belajar di Fakultas Taribyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Fakultas Taribyah IIQ Jakarta. Ketiga, rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh Pemerintah dan pimpinan/pengelola Universitas, Fakultas dan Program Studi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan MBKM khususnya di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia.

## **10. Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dengan rincian tahapan berikut:

Periode	Rencana aktivitas
---------	-------------------

Juli -Agustus 2023	Studi literature untuk memperbaiki proposal penelitian
Agustus 2023	Penyusunan instrumen-instrumen penelitian untuk penelitian metode studi kasus dan kuesioner untuk penelitian dengan metode survei
September 2023	Pengumpulan data-data kualitatif dan kuantitatif
September-Oktober 2023	Analisis dan Pembuatan Draft Laporan Penelitian
November 2023	Perbaiki Laporan Penelitian
Desember 2023	Penulisan laporan akhir dan penyusunan draft untuk publikasi

## 11. Anggaran Penelitian

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Rp 60.000.000 (terlampir)

## 12. Tim/Organisasi Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilakukan oleh Tim Peneliti dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Peneliti	Dr. Khalilah, M.Pd
Anggota Peneliti	Maftuhah, M.Pd
Anggota Peneliti	Widyawati Fernanda

## 13. Daftar pustaka/ bibliografi awal.

- Aji, R.H.S., & Putra, M.H.I. (2021). Role Model Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Non-Agama. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(6): 2001-2010.
- Astuti, S.Y., Rosiawa, R.W., & Suyitono, S. (2021). Student Responses to the Implementation of MBKM (Study on FEB Students who follow International Course Asia University). *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(1): 176–185.
- Brodjonegoro, S.S. (2020). Pembelajaran Masa Depan yang Tidak Pasti. *Kompas*, 29 Juni, 2020
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London: Sage

- Fan, G. (2020). Introduction: Education Policy and Reform in the Changing World, dalam Fan, Gourui., & Pokewitz, Thomas S. (eds), *Handbook of Education Policy Studies: Values, Governance, Globalization and Methodology*. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.
- Fuadi, T.M., & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan dan Kendala Yang Dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2): 603-614.
- Gaus, N., Yunus, M., Karim, A., & Sadia, H. (2019). The analysis of policy implementation models in higher education: the case study of Indonesia. *Policy Studies*, 40(1): 92-109
- Haris, A. (2021). Belajar Merdeka Melalui Merdeka Belajar. *Kompas*, 9 Maret 2021
- Kamalia, P.U., & Andriansyah, E.H. (2021). Independent Learning-Independent Campus (MBKM) in Students' Perception. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(4): 857-867
- Laksana AS, F.X. (2020). Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Adaptif. *Kompas*, 3 November 2020.
- Mariyana, S., Gistituatuti, N., & Betri, A. (2022). Village Project as the Implementation of the Program of Freedom to Learn-Independent Campus (MBKM) in Geograpgy Education Program. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, 6(1): 9-14
- Media Indonesia. (2021). Kurikulum MBKM Dibuat Adaptif Menyesuaikan Dinamika Industri. *Media Indonesia*, 1 Oktober 2021. Diunduh dari: <https://mediaindonesia.com/humaniora/436955/kurikulum-mbkm-dibuat-adaptif-menyesuaikan-dinamika-industri>
- Mediana, M. (2021). Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Perlu Kesiapan Teknis yang Matang. *Kompas*, 13 April 2021
- Mulyono, P. (2020). Tantangan Merdeka Belajar. *Kompas*, 21 Februari 2020.
- Oebaidillah, S. (2021). Tujuh Kampus Nasional Bentuk Konsorsium Dukung MBKM. *Media Indonesia*, 03 Maret 2021. Diunduh dari: <https://mediaindonesia.com/humaniora/388405/tujuh-kampus-nasional-bentuk-konsorsium-dukung-mbkm>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Prasetyo, A. (2021). Lembaga Pendidikan Harus Terus Berinovasi. *Media Indonesia*, 27 Juli 2022. Diunduh dari: <https://mediaindonesia.com/humaniora/421232/lembaga-pendidikan-harus-terus-berinovasi>
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2): 276-292
- Robeyns, I. (2006). Three models of education Rights, capabilities and human capital. *Theory and Research in Education*, 4(1): 69-84
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). *Management*. London: Prentice-Hall. 9th ed.
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2): 425-434
- Rokhman, F. (2021). Momentum Emas Kebangkitan Pendidikan Tinggi. *Media Indonesia*, 17 Desember 2021.
- Saunders, D.B. (2010). Neoliberal ideology and public higher education in the United States. *The Journal for Critical Education Policy Studies*, 8(1): 41-77
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tridiatno, A. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pembelajaran Reflektif. *Kompas*, 17 Maret 2022.
- Triwiyanto, T. (2021). Kampus Kapan Merdeka. *Kompas*, 26 Oktober 2021.
- Van Vught, F.A. (1995). Policy Models and Policy Instruments in Higher Education: The Effects of Governmental Policy-Making on the Innovative Behaviour of Higher Education Institutions. *IHS Political Science Series*, Working Paper 26
- Wardhani, G.A.P.K., Susanty, D., Oksari, A.A., Nurhayati, L., Nuranzani, A., & Faridha, F. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Program Studi Kimia Universitas Nusa Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sains Indonesia*, 5(1): 53-59.
- Widayani, A. (2021). Ekosistem Belajar Sepanjang Hayat Sendi Transformasi Pendidikan. *Kompas*, 23 September 2021
- Widhoroso, W. (2021a). MBKM Bawa Perubahan Besar Pada Dunia Pendidikan Tinggi Indonesia. *Media Indonesia*, Jumat 10 September 2021. Diunduh dari: <https://mediaindonesia.com/humaniora/431696/mbkm-bawa-perubahan-besar-pada-dunia-pendidikan-tinggi-indonesia>

- Widhoroso, W. (2021b). Kampus Merdeka Latih Mahasiswa Berkolaborasi. *Media Indonesia*, Kamis 27 Mei 2021. Diunduh dari: <https://mediaindonesia.com/humaniora/407819/kampus-merdeka-latih-mahasiswa-berkolaborasi>
- Widianarko, B. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Roh 'Universitas'. *Kompas*, 12 Juni, 2021.
- Widiyono, A., Irfana, S, & Firdausia, K. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis di Sekolah Dasar. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan ke-SD-an*, 16(2): 102-107.
- Wisetrotomo, S. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Tanpa Imajinasi. *Kompas*, 7 Oktober 2021.
- Yin, Robert K. (2014). *Case Study Research Design and Methods*. London: Sage Publication.
- Zakiyyah, Z., Cahyani, M.D., & Fatnan, N. (2021). Readiness of the Science Education Study Program in the Implementation of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Curriculum. *Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains*, 10(2): 160-168.
- Zaluchu, F. (2022). Dunia Persilatan Merdeka Belajar. *Kompas*, 21 Juni 2022